



## Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Kota Kendari

| <u>INFO PENULIS</u>   | <u>INFO ARTIKEL</u>   |
|---|---|
| La Ali<br>Universitas Sulawesi Tenggara<br><a href="mailto:laalibana@gmail.com">laalibana@gmail.com</a>                   | ISSN: 2808-1307<br>Vol. 5, No. 2, Agustus 2025<br><a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a> |
| Joko Tri Brata<br>Universitas Sulawesi Tenggara<br><a href="mailto:tribratajoko64@gmail.com">tribratajoko64@gmail.com</a> |   |
| La Ode Bariun<br>Universitas Sulawesi Tenggara<br><a href="mailto:Lm.bariun@yahoo.com">Lm.bariun@yahoo.com</a>            |   |

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Ali, L., Brata, J. T., & Bariun, L. O. (2025). Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2975-2982.

### **Abstrak**

Kehidupan masyarakat perkotaan umumnya terpusat dalam pembangunan sektor formal, dan tidak jarang warga pedesaan merasa bahwa hidup di kota lebih menjanjikan dibandingkan hidup di desa. Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan bidang usaha yang pada umumnya diperuntukkan khususnya bagi golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan, implmentasi kebijakan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk ; (1) mengetahui Bagaimana Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Kendari, (2) mengetahui Model Evaluasi Kebijakan Penanganan Pedaganag Kaki Lima di Kota Kendari, dan (3) mengetahui Pola Penanganan PKL seperti apakah yang tepat diterapkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Kendari. Metode Penelitian adalah dengan penelitian Deskriptif dengan melakukan survey pada 3 lokasi sampel yaitu Kawasan Kendari Beach, Kawasan Jalan Lasandara dan Kawasan Bumi Praja sekitar Kantor Gubernur. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ; (1) Model Evaluasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Kendari adalah ; (a) Memenuhi efektivitas.(b) Memenuhi efisiensi. (c) Belum memenuhi kecukupan. Kebijakan penentuan lokasi, (d). Memenuhi kesamarataan, (e) Memenuhi responsivitas, dan (f) Memenuhi ketepatan. (2) Berkaitan dengan Pola Penanganan yang diterapkan adalah mengkedapkan pola persatuan, dengan adanya kelompok, agar lebih mudah pengaturan serta kepatuhan terhadap peraturan. Dari kesimpulan, Agar penanganan PKL lebih baik, maka disarankan ; (1) Pemerintah perlu untuk menegaska dan mengakomodasi keinginan PKL menjadi pedagang resmi sebagai bentuk keseriusan dalam merangkul dan memberdayakan ekonomi informal, (2) Pedagang harus patuh pada peraturan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, UMKM, Masyakat Sejahtera, Peran Pemerintah.

### Abstract

The life of urban communities is generally centered on the development of the formal sector, and it is not uncommon for rural residents to feel that living in the city is more promising than living in the village. Street vendors are a business activity that is generally intended especially for the weak economic groups who need to get guidance for growth and development, implementation of Regional Government policies. The objectives of this study are to; (1) find out How to Handle Street Vendors in Kendari City, (2) find out the Evaluation Model of Street Vendor Handling Policies in Kendari City, and (3) find out what kind of Street Vendor Handling Pattern is appropriate to be applied in order to increase community income in Kendari City. The Research Method is Descriptive research by conducting surveys at 3 sample locations, namely the Kendari Beach Area, the Lasandara Street Area and the Bumi Praja Area around the Governor's Office. The results of the study show that; (1) The Evaluation Model of Street Vendor Handling Policies in Kendari City is; (a) Meets effectiveness. (b) Meets efficiency. (c) Has not met sufficiency. Location determination policy, (d). (e) Fulfilling equality, (f) Fulfilling responsiveness, and (f) Fulfilling accuracy. (2) Regarding the Handling Pattern implemented, it prioritizes a unified pattern, with the existence of groups, to facilitate regulation and compliance with regulations. From the conclusion, to improve the handling of street vendors, it is recommended: (1) The government needs to emphasize and accommodate the desire of street vendors to become official vendors as a form of seriousness in embracing and empowering the informal economy, (2) Vendors must comply with regulations.

**Keywords:** Policy Evaluation, Street Vendors, MSMEs, Prosperous Society, Role of Government.

### A. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat perkotaan umumnya terpusat dalam pembangunan sektor formal, dan tidak jarang warga pedesaan merasa bahwa hidup di kota lebih menjanjikan dibandingkan hidup di desa. Dengan demikian, banyak warga dari kawaan desa dan kawasan sekitar khususnya Kota Kendari yang melakukan perpindahan ke kota untuk mensejahterakan hidupnya. Hal ini dikarenakan fasilitas ataupun lapangan pekerjaan di pedesaan tidak sebanyak dan tidak bervariasi seperti di perkotaan. Namun, upaya dalam mensejahterahkan hidup oleh masyarakat desa yang berpindah ke kota tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada sektor formal. Fenomena umum yang terjadi adalah warga desa yang bermukim di perkotaan mata pencahariannya terpusat pada sektor informal utamanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berkaitan dengan itu, sektor informal merupakan salah satu sektor ekonomi yang terdiri dari usaha-usaha yang berskala kecil, yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja serta kesempatan untuk memperoleh penghasilan bagi para pelakunya. Sektor informal juga merupakan bidang ekonomi yang tidak selalu membutuhkan Pendidikan tinggi ataupun keterampilan yang tinggi, serta surat izin maupun modal besar.

Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan bidang usaha yang pada umumnya diperuntukkan khususnya bagi golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta perlu juga diadakan penertiban dalam rangka mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program penanganan PKL di Kota Kendari, perlu dilakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Evaluasi kebijakan ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan PKL telah berhasil mencapai tujuannya, serta menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Secara spesifik, dalam perspektif kebijakan beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam evaluasi kebijakan PKL Di Kota Kendari adalah pertama, ketepatan sasaran kebijakan oleh aparat yang melakukan penanganan, Kedua efektivitas Implementasi yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan di tingkat pedagang Kaki Lima sendiri, termasuk peran petugas di lapangan dalam melakukan, koordinasi antar instansi, dan pemanfaatan teknologi dalam penanganan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kemanusiaan yang diterapkan.

Ketiga, dampak kebijakan yaitu Sejauh mana sektor informal ini (PKL) mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemberian jasa perdagangan serta memutus rantai kemiskinan di Kota Kendari, dan tentu saja hambatan dan tantangan yaitu apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKL, baik dari segi kebijakan, sumber daya manusia, maupun penerimaan masyarakat dalam hal penegakkan Perda.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Model Evaluasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Kendari
2. Untuk mengetahui Pola Penanganan PKL seperti apakah yang tepat diterapkan.

### **Konsep Teori Evaluasi**

Scriven (1967) dalam Tayibnapi (2000) menyatakan bahwa evaluasi dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dalam hal ini evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, dan sebagai fungsi sumatif yaitu evaluasi untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Selanjutnya Clive Gray sebagaimana dikutip oleh Reflis (2002), mengungkapkan tentang evaluasi yaitu upaya membandingkan antara apa yang direncanakan dengan hasil yang dicapai.

Pada bagian lain Bryant and White (1989) menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi suatu rencana atau program dan implementasi, terdapat kendala, yaitu: (a) Kendala psikologis, yaitu evaluasi dapat menjadi ancaman dan orang melihat bahwa evaluasi itu merupakan sarana untuk mengkritik orang lain; (b) Kendala ekonomis, yaitu untuk melaksanakan evaluasi yang baik itu mahal dalam segi waktu dan uang, serta tidak selalu sepadan antara ketersediaan data dan biaya; (c) Kendala teknis, yaitu kendala yang berupa keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengolahan data dan informasi yang tidak dapat disediakan tepat pada waktu dibutuhkan. Kejadian ini biasanya timbul ketika informasi dan data itu belum dibutuhkan, maka biasanya hanya akan ditumpuk begitu saja tanpa diolah; (d) Kendala politis, yaitu hasil-hasil evaluasi mungkin bukan dirasakan sebagai ancaman oleh para administrator saja, melainkan secara politis juga memalukan jika diungkapkan. Menurut Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994), ada beberapa model/jenis evaluasi berdasarkan kekuatan kesimpulan yang diperolehnya, yaitu: (1) Evaluasi single progame after-only; (2) Evaluasi single progame before-after; (3) Evaluasi comparat

Lebih jauh menurut Dunn (1998) sifat evaluasi adalah menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Dalam analisis evaluasi pertanyaan utama bukan mengenai fakta (apakah sesuatu ada) atau arti (apakah yang harus dilakukan) tetapi lebih diterangkan pada aspek nilai. Jadi secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment).

### **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan suatu kebijakan publik. Evaluasi ini sangat penting dalam siklus kebijakan karena membantu pembuat kebijakan memahami apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan atau perlu diperbaiki.

Evaluasi kebijakan memiliki peran strategis dalam ; (a) Menilai kinerja kebijakan: Apakah kebijakan berhasil mencapai tujuan? Apakah berdampak positif terhadap kelompok sasaran, (b) Dasar pengambilan keputusan: Memberikan informasi berbasis bukti (evidence-based) bagi pembuat kebijakan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan kebijakan, sehingga (c) ada Perbaikan berkelanjutan: Memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas kebijakan di masa depan.

Tantangan dalam Evaluasi Kebijakan, adalah ; (a) Data yang tidak memadai atau tidak akurat, (b) Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang kompeten, (c) Resistensi dari pihak yang merasa terancam oleh hasil evaluasi, (d) Kompleksitas dampak kebijakan yang kadang tidak langsung terlihat.

Olehnya itu, Evaluasi kebijakan harus dilakukan secara objektif, independen, dan bebas dari intervensi politik agar hasilnya valid dan kredibel. Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses evaluasi agar hasilnya lebih inklusif dan representatif.

Secara umum, padangan mengenai evaluasi kebijakan bukan hanya proses administratif, tetapi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Evaluasi yang tepat akan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas kebijakan publik secara berkelanjutan.

### **C. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran. Seseorang mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri yang bersifat informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda, jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL. Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil di kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan ditempat-tempat umum seperti emper-emper toko, ditepi jalan raya, taman-taman dan pasar.

Keberadaan PKL sering dikaitkan dengan determinan-determinan sosial seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah dan unsur-unsur ketidakpastian, ternyata PKL tidak luput dari hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial, jaringan sosial sesama mereka.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (bargaining position) mereka lemah dan menjadi obyek penertiban dan penataan kota.

### **B. Metodologi**

Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif, dengan membandingkan peninjauan terhadap suatu pendalaman akan bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan PKL.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data diperoleh peneliti. Menurut Lofland dan lofland (dalam Moleong, 2005: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan, seperti dokumentasi dan lain sebagainya. Dan untuk jenis datanya, dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Jadi sumber data yang terdapat pada penelitian ini observasi sebagai pengumpulan data utama, dan teknik dokumentasi menjadi sumber data tambahan.

Untuk menjawab tujuan penelitian analisa data yang bersumber dari pustaka dan laporan laporan hasil penanganan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan analisa secara kualitatif, dengan mendeskripsikan berdasarkan dokumentasi hasil hasil penelitian terdahulu dan gambaran Profil Kota Kendari beserta upaya penanagana PKL di Kota Kendari, dan dengan metode Triagulasi. Dengan proses penelitian pengembangan bersifat melingkar atau berpilin mulai dari aktivitas analisa, merancang, mengevaluasi, dan merivisi sampai tujuan yang diinginkan. Analisis data Triangulasi dilakukan menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 337)

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

Evaluasi Kebijakan Publik adalah proses sistematis untuk menilai kinerja, efektivitas, dan dampak suatu kebijakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta untuk menyediakan informasi yang membantu pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di masa depan.

Anderson (1975) mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Evaluasi kebijakan publik memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai

melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi membari sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan publik lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008).

Evaluasi kebijakan publik mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi seangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluative. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai "evaluasi" dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif – yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designative (faktual) ketimbang tuntutan evaluative. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk "penelitian evaluasi" atau "evaluasi kebijakan" (Bardach, E. 2008). Dalam hal pelaksanaan evaluasi kebijakan publik, maka diasumsikan bahwa evaluasi kebijakan yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi tentang dampak dari pelaksanaan penangan penegakan perda berkaitan dengan Penanganan PKL, dengan memperhatikan aspek keberlanjutannya yakni: (1) apakah program dilanjutkan oleh masyarakat; (2) apakah ada multiplier effect dari program tersebut; (3) apakah telah terjadi transfer of knowledge/technology; dan (4) apakah telah terjadi pengembangan kapasitas (Capacity building). Konsekuensi atau dampak suatu kebijakan dapat diketahui dan diukur keberhasilannya melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (1999) dapat dinilai dengan 6 kriteria evaluasi sebagai berikut:

1. Efektivitas (effectiveness), adalah apakah alternatif atau kebijakan mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi (efficiency), adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, umumnya diukur dari aspek moneter.
3. Kecukupan (adequacy), adalah seberapa jauh tingkat efektivitas memenuhi dan memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Kesamarataan (equity), adalah akibatnya secara adil didistribusikan seperti berkaitan dengan distribusi kesamarataan pendapatan, pendidikan yang erat dengan keadilan dan kewajaran.
5. Responsivitas (responsiveness), adalah seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan nilai kelompok masyarakat. Kriteria ini adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamarataan, sehingga responsivitas mengandung pertanyaan praktis apakah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamarataan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan (appropriateness), adalah berkaitan dengan nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan program tersebut, dengan kata lain kriteria ini mempertanyakan apakah program tersebut tepat untuk masyarakat.

Anaalisis Dampak Kebijakan akan terlihat dari hasil penelitian yang menggambarkan terdahulu, yang mengkaji dari 6 indikator kriteria evaluasi kebijakan terhadap variabel kebijakan, dan lebih jelasnya dapat disimpulkan melalui tabel berikut ini :

Tabel Kesimpulan Berdasarkan Kriteria Efektifitas ;

| Kriteria           | Kebijakan  | Dampak menurut PKL  |
|--------------------|--|---|
| <i>Efektivitas</i> | Apakah kebijakan penataan yang dilakukan efektif dalam artian oleh pemerintah telah mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas PKL. | Memenuhi efektivitas. Kebijakan penataan yang ada menurut sebagian besar pedagang telah mendukung untuk mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas mereka dalam memperoleh pendapatan. |

Secara jelas, keberlangsunga dan efektifitas, dirasakan dengan adanya PKL resmi sudah merasakan kemudahan dalam pengurusan surat izin usaha berupa TDU untuk keperluan pinjaman modal, koordinasi PKL yang dibentuk oleh pengelola sangat mendukung dalam keberlangsungan mereka dalam beroperasi. Ketentuan jam operasi yang diberikan pengelola saat ini sudah dipatuhi oleh pedagang yang disesuaikan dengan waktu, keramaian di anjungan, tetapi masih perlu meningkatkan kepatuhan dan efektifitas penerimaan, agar patuh pada kebijakan pemerintah.

Kesimpulan Berdasarkan Kriteria Efisiensi ;

| <b>Kriteria</b>  | <b>Kebijakan</b>   | <b>Dampak menurut PKL</b>   |
|------------------|--|---|
| <i>Efisiensi</i> | Apakah upaya pedagang dalam mengikuti kebijakan penataan dan pemberdayaan sebanding dengan pendapatan yang diperoleh | Memenuhi efisiensi. Kebijakan yang ada mengharuskan pedagang menempati lapak jualan yang telah ditentukan oleh pengelola tanpa perlu berpindah-pindah tempat dan berebutan dengan PKL lain. |

Standarisasi harga dari pengelola untuk semua jenis jualan seperti pisang epe, jagung bakar, dan aneka jus sudah diterapkan oleh seluruh PKL resmi di Pantai Kendari Beach . Bagi pedagang, harga tersebut sudah sesuai baik bagi pedagang yang tidak terlalu rendah dan bagi pembeli yang tidak terlalu tinggi.

Kriteria Efisiensi ini, sebanding dengan besaran biaya yang dikeluarkan ketika berurusan dengan penempatan lokasi PKL

Kesimpulan Berdasarkan Kriteria Kecukupan ;

| <b>Kriteria</b>  | <b>Kebijakan</b>   | <b>Dampak menurut PKL</b>  |
|------------------|--|--|
| <i>Kecukupan</i> | Apakah efektivitas atau tujuan kebijakan yang ingin dicapai dapat memberi kecukupan kebutuhan PKL. | Belum memenuhi kecukupan. Kebijakan penentuan lokasi jualan pada awal relokasi ditentukan langsung oleh pemerintah tanpa melibatkan pihak pedagang sehingga pedagang tidak memiliki pilihan lokasi yang ideal. |

Kecukupan dianalisis berdasarkan kecukupan sarana dan prasana yang didapatkan , dimana Dengan demikian anlasi yang berkaitan dengan kebijakan kecukupan sarana prasarana, sudah dianggap memenuhi kecukupan, walaupun tidak ada pilihan untuk menentukan lokasi sendiri.

Kesimpulan Berdasarkan Kriteria Kesamarataan ;

| <b>Kriteria</b>     | <b>Kebijakan</b>  | <b>Dampak menurut PKL</b>  |
|---------------------|---|--|
| <i>Kesamarataan</i> | Apakah manfaat kebijakan telah didistribusikan secara merata kepada setiap PKL. | Memenuhi kesamarataan. Kebijakan untuk mengakomodasi PKL menjadi pedagang resmi menurut pedagang telah dilakukan oleh seluruh PKL kategori lama walaupun pada awalnya ada beberapa pedagang yang menolak untuk direlokasi. |

Penyediaan dukungan sarana prasarana seperti misalnya instalasi air bersih, masih dianggap belum merata, bahkan ada yang belum tersedia. sehingga beberapa pedagang membawa secara mandiri air bersih dari rumah. Sedangkan manfaat dari surat TDU tidak dirasakan seluruhnya oleh pedagang untuk keperluan pinjaman modal, hal ini karena sebagian pedagang tidak mengetahui mekanisme dalam pengurusannya.

Tabel kesimpulan Responsivitas ;

| Kriteria             | Kebijakan   | Dampak menurut PKL   |
|----------------------|---|--|
| <i>Responsivitas</i> | Apakah hasil kebijakan oleh pemerintah diterima dengan baik oleh PKL. | Memenuhi responsivitas. Kebijakan yang telah ditentukan pemerintah dapat diterima dan ditaati oleh pedagang secara sukarela maupun terpaksa demi jaminan keberlangsungan aktivitas mereka. |

Kebijakan ini didasari atas respon pedagang dengan ukuran yang bersifat himbauan Pemerintah berupa membatasi jenis makanan yang berpotensi mencemari lingkungan lapak, dan upaya menampati lapak yang tersedia serta yang disepakati. Kenyanannya masih terdapat beberapa pedagang yang menyiapkan menu yang termasuk dalam pembatasan tersebut karena pedagang mengikuti selera pembeli. Adapun himbauan untuk tidak memajang produk seperti air mineral dan minuman sachet sulit untuk ditaati pedagang karena menurut mereka produk tersebut merupakan kebutuhan utama untuk pembeli.

Tabel kesimpulan Ketepatan ;

| Kriteria         | Kebijakan  | Dampak menurut PKL  |
|------------------|--|---|
| <i>Ketepatan</i> | Apakah tujuan kebijakan oleh pemerintah sesuai dengan manfaat atau tepat guna yang diterima oleh PKL | Memenuhi ketepatan. Kebijakan pemerintah mengakomodir PKL menjadi pedagang resmi menurut para pedagang sebagai bentuk apresiasi dan keseriusan pemerintah terhadap mereka dalam merangkul dan memberdayakan ekonomi informal sehingga pedagang memperoleh manfaat keamanan dari penertiban. |

Status penggunaan lapak yang diterima oleh pedagang saat ini adalah hak menggunakan lapak tanpa batas waktu tertentu (tanpa ikatan kontrak) dikarenakan lahan merupakan ruang publik perkotaan dan sewaktu-waktu pemerintah dapat mencabut hak penggunaan tersebut. Sedangkan himbauan dalam membatasi pemajangan produk menurut pedagang tidak memberikan manfaat secara ekonomi dan tidak berpihak kepada keberlangsungan aktivitas PKL.

#### D. Kesimpulan

Kehidupan masyarakat perkotaan umumnya terpusat dalam pembangunan sektor formal, dan tidak jarang warga pedesaan merasa bahwa hidup di kota lebih menjanjikan dibandingkan hidup di desa. Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan bidang usaha yang pada umumnya diperuntukkan khususnya bagi golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan, implmentasi kebijakan Pemerintah Daerah

1. Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Kendari, dilaksanakan dengan menerapkan kebijakan pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan kepatuhan warga masyarakat akan pemanfaatan kawasan yang sesuai peruntukan.
2. Model Evaluasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Kendari adalah ; (1) Memenuhi efektivitas. Kebijakan penataan yang ada menurut sebagian besar pedagang telah mendukung untuk mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas mereka dalam memperoleh pendapatan, (2) Memenuhi efisiensi. Kebijakan yang ada dengan upaya mengharuskan pedagang menempati lapak jualan yang telah ditentukan oleh pengelola tanpa perlu berpindah-pindah tempat dan berebutan dengan pedagang lain, (3) Belum memenuhi kecukupan. Kebijakan penentuan lokasi jualan pada awal relokasi ditentukan langsung oleh pemerintah tanpa melibatkan pihak pedagang sehingga pedagang tidak memiliki pilihan lokasi yang ideal, (4). Memenuhi kesamarataan. Kebijakan untuk mengakomodasi PKL menjadi pedagang resmi menurut pedagang telah dilakukan oleh seluruh PKL kategori lama walaupun pada awalnya ada beberapa pedagang yang menolak untuk direlokasi, (5) Memenuhi responsivitas. Kebijakan yang telah ditentukan pemerintah dapat diterima dan ditaati oleh pedagang secara sukarela maupun terpaksa demi jaminan keberlangsungan aktivitas mereka. Dan (6) Memenuhi ketepatan. Kebijakan pemerintah mengakomodasi PKL

menjadi pedagang resmi menurut para pedagang sebagai bentuk apresiasi dan keseriusan pemerintah terhadap mereka dalam merangkul dan memberdayakan ekonomi informal sehingga pedagang memperoleh manfaat keamanan dari penertiban.

3. Pola Penanganan PKL yang diterapkan adalah mengkedepankan pola persatuan, dengan harapan adanya kelompok (peratuan pedagang) agar lebih mudah pengelolaan dan pengaturan serta kepatuhan terhadap peraturan yang diterapkan Pemerintah Kota Kendari.

### Saran

Agar kehidupan masyarakat Kota Kendari, bisa sejahtera dan kebijakan Pemerintah bisa sejalan dengan keinginan masyarakat, maka ; (a) Pemerintah perlu untuk mengegaskan kepada para PKL dan mengakomodasi keinginan para PKL menjadi pedagang resmi sebagai bentuk apresiasi dan keseriusan pemerintah terhadap mereka dalam merangkul dan memberdayakan ekonomi informal sehingga pedagang memperoleh manfaat keamanan dari penertiban, (b) Pedagang juga harus tetap patuh pada peraturan yang telah di tetapkan, sehingga kesemrawutan penggunaan kawasan tetap terjaga dan indah.

### E. Referensi

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Qualitative*. Ar-Ruzz Media Yogyakarta.
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Bardach, E. (2008). *A Practical Guide for Policy Analysts: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. Third Edition. CQ Press, pp. 1-10
- Bellion, C. J. (1980). *Organization Theory and The New Public Administration*. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon Inc.
- Berelson, B., & Steiner, G.A. (1964). *Human Behaviour: Shorter Edition*. Harcourt, Brace and World, Inc., New York.
- Denhardt Robert, B. and Janet V. Denhardt. 2006. *Public Administration: An Action Overview*, Fifth Edition Thomson Wadsworth, United States of America.
- Etzioni, A. (1961). *Comparative Analysis of Complex Organizations*. The Free Press of Glencoe, Inc., USA.
- Grindle, M. S. (1997). Editor and Contributor, *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries* (Cambridge, MA: Harvard University Press for Harvard Institute for International Development, 1997); Chapter 1, "The Good Government Imperative: Human Resources, Organizations, and Institutions;" Chapter 2, with Mary Hilderbrand, "Building Sustainable Capacity in the Public Sector: What Can Be Done?"
- Iham, D., S. M. R., Karunia, L., Saleh, S., & Brata, J. T. (2023). Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(2), 155–162. <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i2.3736>.
- Miles, M., & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press Jakarta
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua Puluh Enam. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Robbins, S. P. (2003). *Perilaku Organisasi PT Indeks Jakarta*
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi : Struktur Desain dan Aplikasi*. Arcan Jakarta
- Sachs, J. D. (2005). *Can Extreme Poverty be Eliminated*, Scientific America Inc.
- Senge, P. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, Random Century, New York
- Simon, A. H. (1965). *Administrative Behavior : A Study of Decision Making Process in Administrative Organization*, Second Ed. A Free Press Paper Back- The Macmillian Company Toronto.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. Materi Latihan : Analisis Kebijakan Sosial. Dalam <http://www.policy.hu/suharto/makIndo21.html>
- William N. Dunn. (1998), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.